

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

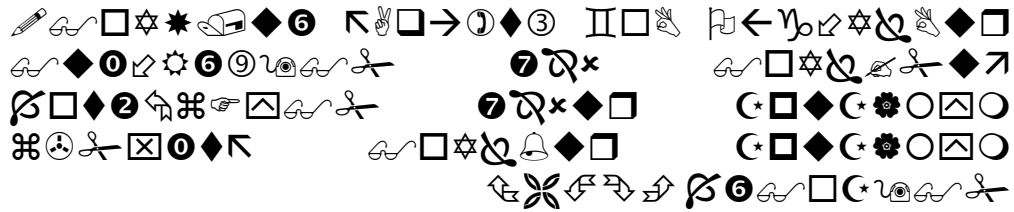
Islam merupakan agama yang bersifat universal juga merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan bagi kehidupan umat manusia¹. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalankan kehidupan yang baik dan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang diinginkannya, baik kebahagiaan dunia maupun diakhirat. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja dan menyampingkan untuk meminta-minta. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah seorang muslim yang baik apabila mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga meninggalkan akhirat untuk tujuan dunia².

Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunnaturnasul mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik diakhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan hidup lahir dan batin³. Kesejahteraan yang hendak dicapai adalah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 201:

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 1.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 12.

³ Wirdyaningsih dan Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 4.



Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"⁴.

Hal ini berarti bahwa dalam mengerjakan kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Amal saleh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk kedalam kategori muamalah⁵. Karena kewajiban-kewajiban muamalah, maka bagi mereka yang tidak pandai berusaha, tersedia berbagai alternatif kegiatan ekonomi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW., seperti penyertaan dana (investasi) dalam bentuk berikut ini:

1. Penyertaan seluruh dana yang diperlukan seorang pengusaha untuk usaha tertentu dengan sistem bagi hasil atas dasar kepercayaan (*al-mudharabah*).
2. Pembiayaan bersama suatu usaha dengan sistem bagi hasil sesuai dengan penyertaannya masing-masing (*al-musyarakah*).

Kegiatan ekonomi lainnya yang telah ada sebelum Islam tapi tidak dilarang atau didiamkan berlaku adalah kegiatan tukar menukar antara barang dengan uang (jual beli), sewa menyewa, tukar menukar barang dengan barang (*barter*), dan pinjam meminjam uang, seperti:

1. Kegiatan jual beli barang dengan pembayaran tangguh seluruhnya pada waktu jatuh tempo (*al-murabahah*).

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Riels Grafika, 2009), h. 31.

⁵ Wirdyaningsih dan Karnaen Perwataatmadja, dkk, *Loc.cit.*.

2. Kegiatan sewa menyewakan barang (*al-ijarah*).
3. Kegiatan sewa menyewa barang yang diakhiri dengan alih pemilikan.
4. Kegiatan barter antara barang yang berlainan jenis.
5. Kegiatan pinjam meminjam uang tanpa tambahan apapun disaat pengembalian (*al-qardul hasan*)⁶.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sistem ekonomi Islam mulai disepakati oleh pemerintah ditandai dengan berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah, pasar modal syariah, serta aktivitas ekonomi syariah lainnya yang berkembang akhir ini, diantaranya adalah pegadaian syariah⁷. Keberadaan pegadaian syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelompok ekonomi lemah, yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa pegadaian syariah apabila memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat, dan mudah sehingga mereka merasa tertolong dengan keberadaan pegadaian syariah sebagai *rahmatan lil 'alamin* akan terasa.

Pada masa krisis, PT. Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya usaha kecil. Peran Pegadaian dalam pembiayaan masyarakat sesuai dengan tujuan PT. Pegadaian, disamping memupuk keuntungan. Selain itu juga sebagai penunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional melalui penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai⁸.

⁶ *Ibid.*, h. 9.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), Cet. Ke-2, h. 158.

⁸ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 69.

Pegadaian syariah melakukan kegiatan penyediaan dana atas dasar hukum gadai yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah. Pegadaian syariah di Indonesia melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan berbagai kegiatan pegadaian yang pelaksanaannya sesuai hukum Islam.

Menurut Bank Indonesia gadai syariah adalah akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas seluruh hutangnya⁹. Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor ini. Padahal Pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad Saw, yang menjanjikan perekonomian rakyat untuk dikembangkan¹⁰.

Pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum di perbankan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran dana atas dasar hukum gadai¹¹. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar

⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 28.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 15.

¹¹ Ade Arthesa, *Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 272.

tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat. Sesuai dengan moto pegadaian “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*”¹².

Pegadaian syariah menawarkan sejumlah alternative pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dana masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman pegadaian syariah tidak hanya menawarkan produk dalam bentuk pembiayaan, tapi juga menawarkan produk investasi. Investasi adalah suatu cara atau strategi untuk memutar kelebihan dana yang kita miliki agar menghasilkan dana yang lebih besar, baik dengan campur tangan kita maupun tidak¹³.

Adapun investasi yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah dalam bentuk Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), atau yang dikenal dengan Emas Batangan. Emas Batangan merupakan bentuk investasi emas yang paling ideal meski membutuhkan modal awal yang lebih besar ketimbang lebih memilih perhiasan atau koin karena kandungan nilainya tertinggi dan tidak mengenal penyusutan nilai.

Pegadaian syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam kepemilikan logam mulia, dimana mekanisme yang dimaksud adalah cara kerja (sistem kerja) suatu organisasi (perkumpulan) dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, Pegadaian syariah mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, pegadaian syariah menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran

¹² Juslaini (Penaksir Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani), *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Agustus 2014.

¹³ Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 1.

tangguh atau tunai dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara pegadaian syariah dan nasabah yang disebut dengan *murabahah*¹⁴.

Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. Pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%¹⁵.

Akad yang digunakan pada produk mulia adalah akad *murabahah* dan akad gadai (*rahn*). Dimana pihak pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* logam mulia kepada pihak nasabah dengan syarat-syarat yang berlaku di pegadaian syariah. Dengan adanya pembiayaan, emas yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).

Gadai (*Rahn*) merupakan suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai¹⁶.

Jaminan dalam akad *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Sehingga Bank atau PT. Pegadaian syariah sebagai *murtahin* dapat meminta nasabah sebagai *rahin* untuk menyediakan barang jaminan (*al-marhun*) yang dapat dipegang¹⁷.

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, h. 165.

¹⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Ed. Ke-3, Cet. Ke-3, h. 113.

¹⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke-1, h. 16.

¹⁷ Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 125.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani adalah salah satu Pegadaian yang beroperasi secara syariah yang juga menawarkan produk Mulia. Menurut Fandi Tjiptono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi konsumen sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang bersangkutan. Pengertian lain produk adalah sesuatu yang dihasilkan produsen, yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen¹⁸.

Produk Mulia merupakan produk pegadaian syariah yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk berinvestasi jangka panjang dengan memiliki emas logam mulia dengan cara membeli di Pegadaian, sedangkan masyarakat membayar dengan cara mengangsur.

Pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Jenis emas yang disediakan oleh pegadaian syariah cabang Ahmad Yani adalah dalam bentuk emas batangan (emas kuning) dengan berat 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg. Harga emas yang dipakai mengacu kepada PT Antam, karena pegadaian akan memesan emas tersebut ke Perusahaan ini setelah nasabah mendaftarkan diri di program ini dengan membayar uang muka, dan biaya administrasi. Emas akan diberikan kemudian setelah nasabah menyelesaikan kewajiban atau angsuran tersebut, karena emas yang dibeli akan dijadikan sebagai barang jaminan sampai pembayaran angsuran lunas¹⁹.

¹⁸ Fandi Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 95.

¹⁹ Juslaini, Penaksir Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, *Wawancara*, Pekanbaru, 11 Agustus 2014.

Untuk mengupayakan pembayaran dari nasabah, maka pihak pegadaian syariah memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam pembayaran angsuran. Denda yang dikenakan PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran adalah sebesar 4% per bulan dari jumlah angsuran²⁰.

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani telah mengikat jaminan dari pihak nasabah, tapi pihak pegadaian tetap menetapkan denda pada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Penetapan denda pada pembiayaan bermasalah yang ditetapkan oleh pegadaian syariah menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap denda yang ditetapkan oleh pegadaian syariah sama saja dengan bunga pada pegadaian atau bank konvensional pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah mekanisme *murabahah* yang dilaksanakan itu boleh dalam pandangan Islam.

Selain adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidakpastian (*gharar*) dalam akad dimana pihak pembeli (nasabah) tidak mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku, akad *murabahah* atau akad *rahn*, sedangkan dalam akad *rahn* nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan, dan adanya unsur pemaksaan dimana tidak ada kebebasan bagi pihak pembeli (nasabah), kecuali harus menyerahkan atau merelakan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutang.

²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “MEKANISME *MURABAHAH* PADA PRODUK MULIA DI PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka dibatasi pada: “Mekanisme *Murabahah* Pada Produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pengetahuan tentang mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.
- b. Sebagai pengetahuan tentang tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.SY) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan yang dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, di Jl. Ahmad Yani No. 01 Pekanbaru, Riau. Kecenderungan penulis memilih lokasi penelitian disini karena banyaknya jumlah nasabah yang menggunakan produk Mulia dibandingkan dengan pegadaian syariah lainnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh karyawan PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah “Mekanisme *murabahah* pada produk Mulia di PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani ditinjau menurut Ekonomi Islam”.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah pimpinan dan seluruh karyawan PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani yang berjumlah 9 orang dengan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga *relevan* dengan rancangan penelitian²¹.

4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti²².

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti²³.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan²⁴. Dalam hal ini penulis

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet. Ke-1, h. 175.

²² Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), Ed 1, h. 190.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), Cet-7, h. 125.

melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti²⁵.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif Kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya²⁶.

7. Metode Penulisan

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus²⁷.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. 1, Cet. 2, h. 108.

²⁵ Emzir, *Analisi Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Ed. 1, Cet. 1, h. 14.

²⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif - Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI press, 2010), Cet. 2, h. 352.

²⁷ Burhan Bungin, *op.cit.*, h. 26.

Bab II memberikan gambaran umum lokasi penelitian tentang sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, visi dan misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, dan produk-produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

Bab III sebagai landasan teori, dikemukakan beberapa teori tentang produk, yaitu: pengertian produk dan kualitas produk, dimensi kualitas produk, harga produk, dan layanan produk. Pada bab ini juga dikemukakan teori tentang *murabahah* yaitu: pengertian *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, macam-macam *murabahah*, manfaat dan resiko *murabahah*, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *murabahah* dan fatwa *murabahah* emas.

Pada bab ini juga dikemukakan teori tentang gadai (*rahn*) yaitu: pengertian gadai (*rahn*), landasan hukum gadai, syarat dan rukun gadai, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang gadai dan gadai emas, serta berakhirnya akad gadai.

Selanjutnya juga dikemukakan teori tentang logam mulia yaitu: pengertian logam mulia, kelebihan dan kekurangan investasi logam mulia.

Bab IV membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme *murabahah* pada produk mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, dan tinjauan ekonomi islam terhadap mekanisme *murabahah* pada produk mulia di PT. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang diperlukan.

Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.